



# Pemkot Benahi Pelayanan 250 Unit Kerja

JOGJA - Peringatan yang dilontarkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jateng-DIJ tentang kualitas layanan publik direspons Pemkot Jogja. Pemkot bergegas mengintensifkan pelayanan publik terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan wilayah.

Jumlah satuan kerja yang didorong untuk semakin memperbaiki layanan mencapai 250 instansi unit kerja.

Kepala Bagian Organisasi Pemkot Kota Jogja Kris Sardjono mengatakan, perbaikan kinerja tersebut bukan lantaran sejumlah SKPD mendapatkan rapor merah. Peningkatan kinerja dilakukan agar lebih fokus pada kualitas perbaikan informasi. Termasuk standar pelayanan yang diterima publik.

"Sebelumnya *warning* diberikan kepada 13 SKPD. Sekarang kita jangkau semua pelayanan dari kelurahan, kecamatan, dan SKPD. Jumlahnya kurang lebih 250 instansi unit kerja. Kita perbaiki," terang Kris usai *workshop* pelayanan publik di Ruang

Utama Atas Balai Kota Jogja kemarin (23/5).

Kris menegaskan, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti sangat memerhatikan masukan dari ORI DIJ-Jateng. Meski lontaran ORI DIJ-Jateng tersebut bukan bersifat wajib, wali kota langsung memberikan "perintah" untuk perbaikan layanan publik di masing-masing SKPD.

Pemkot, lanjut Kris, mewajibkan seluruh pegawai dan kepala dinas dapat mengintensifkan layanan publik. Menurutnya, peringatan dari ORI Jateng-DIJ lebih kepada kepatuhan pemkot dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Perbaikan terkait kualitas pelayanan publik di setiap SKPD dan kewilayahan itu diharapkan terimplementasi dalam rentang sepekan ke depan. Dengan demikian, kualitas informasi yang diterima oleh publik dapat diakses maksimal. Selain itu, memudahkan masyarakat dalam hak mengakses pelayanan publik. (hrp/amd/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005